

**ANALISIS PENGARUH PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO (PDRB),
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN
(SiLPA) DAN JUMLAH PENDUDUK (JP) TERHADAP BELANJA MODAL DI
PROVINSI RIAU TAHUN 2013-2017**

M. Nopriyan Farmana

Program Studi Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta Jln. Brawijaya (Lingkar Selatan), Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55183

Email: tengkualang95@yahoo.com

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal di 12 kabupaten/kota di Provinsi Riau Periode 2013-2017. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dalam bentuk *time series* (2013-2017) dan *cross section* (12 kabupaten/kota) di Provinsi Riau. Alat analisis yang digunakan adalah data panel dengan menggunakan *evIEWS 9* dengan menggunakan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*). Berdasarkan analisis yang dilakukan diperoleh hasil bahwa variabel PAD berpengaruh positif dan signifikan, peningkatan satu persen maka belanja modal di setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau mengalami kenaikan sebesar 0.82%. SiLPA berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Modal, peningkatan SiLPA sebesar satu persen maka belanja modal di setiap kabupaten/kota di Provinsi Riau mengalami kenaikan sebesar 0.16%. Variabel Jumlah Penduduk berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Belanja Modal dimana peningkatan jumlah penduduk satu persen maka belanja modal di setiap kabupaten/kota mengalami penurunan sebesar 6.4%, sedangkan Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Belanja Modal.

Kata Kunci : BM, PDRB, PAD, SiLPA, dan Jumlah Penduduk

ABSTRACT

This study aims to analyze how much the effect of Gross Regional Domestic Product (PDRB), Regional Original Revenue (PAD), More Remaining Budget Financing (SiLPA), and Population Amount to Capital Expenditures in 12 districts/cities in Riau Province 2013-2017 period. The data used in this study are secondary data, in the form of time series (2013-2017) and cross sections (12 districts/cities) in Riau Province. The analytical tool used is panel pada using evIEWS 9 using the fixed effect approach (Fixed Effect Model). Based on the analysis carried out the results show that the PAD variable has a positive and significant effect, an increase of 1%, the capital expenditure in each district/city in Riau Province has increased by 0.82%. SiLPA has a positive and significant effect on Capital Expenditure, an increase in SiLPA of 1%, capital expenditure in each district/city in Riau Province has increase 0.16%. Variable Amount of Population has a negative and significant effect on Capital Expenditure where an increased by 6.4%, while Gross Regional Domestic Product has a negative and not significant effect on Capital Expenditures.

Keywords : BM, PDRB, PAD, SiLPA, and Total Population

PENDAHULUAN

Belanja modal menurut Peraturan Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 pasal 53 adalah belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya.

UU tersebut memberi penegasan bahwa daerah memiliki kewenangan yang dapat menentukan alokasi sumber daya ke dalam belanja-belanja dengan menganut asas kepatutan, kebutuhan dan kemampuan daerah. Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif terlebih dahulu menentukan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai pedoman dalam pengalokasian sumber daya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

Pelaksanaan anggaran, merupakan masalah yang paling banyak dihadapi oleh pemerintah daerah di dalam organisasi sektor publik. Pendapatan daerah yang tinggi, yaitu PAD dan Dana Perimbangan harus diimbangi dengan tingginya Belanja Modal. Namun didalam praktiknya, masih belum terlaksana dengan baik dalam pengalokasian belanja modal tersebut.

Tabel 1. 1 Belanja Modal di Provinsi Riau Tahun 2013-2017

Tahun	Belanja Modal	Pertumbuhan (%)
2013	Rp 1.855.440.411.309	1.19
2014	Rp 1.730.358.806.017	0.9
2015	Rp 2.901.124.900.329	1.6
2016	Rp 2.532.123.773.745	0.8
2017	Rp 2.545.984.515.117	1

Sumber: Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan

Berdasarkan table 1.1 menjelaskan bahwasanya Belanja Modal Provinsi Riau dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami kenaikan dan penurunan setiap tahunnya. Pada tahun 2013 belanja modal sebesar Rp. 1.855.440.411.309 dan tingkat pertumbuhannya sebesar 1,19%, namun pada tahun 2014 terjadi penurunan belanja modal sebesar 0,9% sebesar Rp. 1.730.358.806.017. Pada tahun selanjutnya 2015 mengalami kenaikan dengan penerimaan belanja modal sebesar Rp. 2.901.124.900.329 yang mana pertumbuhannya sebesar 1,6% mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 0,7%. Di tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 0,8% dengan penerimaan belanja modal sebesar Rp. 2.532.123.773.745 dan di tahun 2017 belanja modal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2016 sebesar 0,2 % dengan pertumbuhan 1% belanja modal Rp. 2.545.984.515.117.

Salah satu ruang lingkup dari keuangan negara adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di samping barang-barang inventaris kekayaan negara dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Baik APBN maupun barang-barang inventaris kekayaan negara dikelola secara langsung oleh negara, sehingga keduanya merupakan unsur penting dalam keuangan negara. Sedangkan, pada tingkat pemerintah daerah terdapat ruang lingkup yang serupa dengan keuangan negara, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), barang-barang inventaris kekayaan daerah, dan badan usaha milik daerah (BUMN). Seperti halnya negara, APBD dan barang-barang inventaris kekayaan daerah juga dikelola secara langsung oleh daerah. Keduanya merupakan unsur penting keuangan daerah Kebijakan otonomi daerah di Indonesia telah mengalami masa yang baru seiring diberlakukannya desentralisasi fiskal. Undang - undang (UU) telah mengatur desentralisasi fiskal UU No. 32 tentang pemerintahan daerah dan 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan daerah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, serta Peraturan Pemerintah (PP) No. 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan

keuangan daerah. Dalam hal ini pengelolaan keuangan dan pelaksanaan desentralisasi telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (permendagri) No. 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi fiskal diharapkan mampu mendorong pertumbuhan kemandirian daerah dalam mengelola sumber-sumber kekayaan daerah untuk kepentingan daerah itu sendiri.

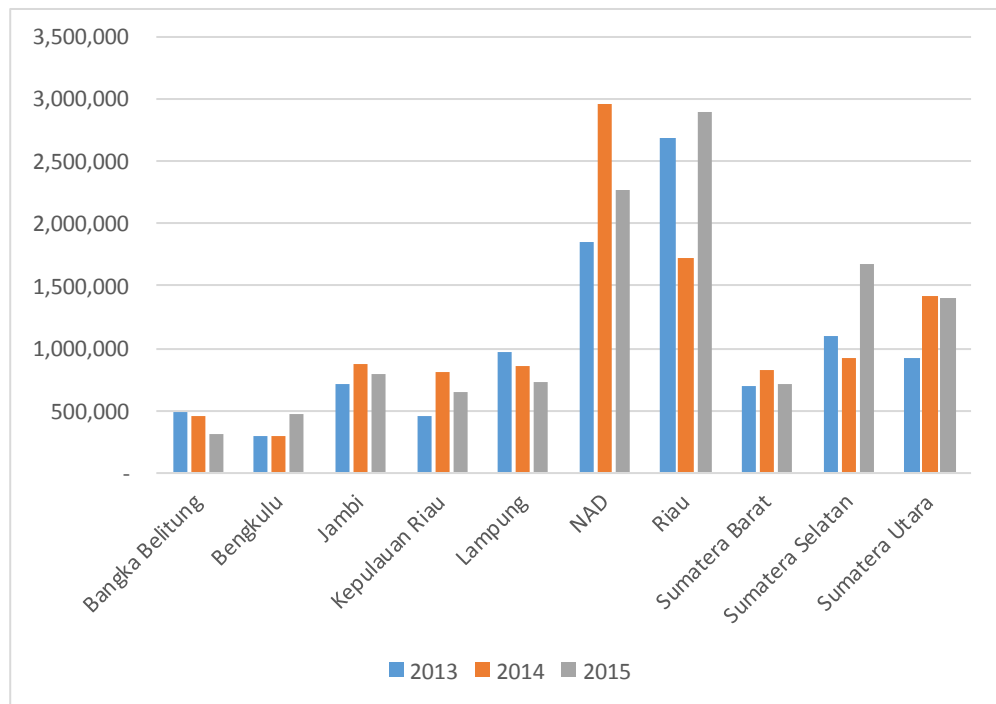
Didalam ayat Al-Quran Allah SWT sudah menjelaskan tentang mengelola kekayaan alam untuk kemaslahatan umat yang tertera di Surat Hud ayat 61 yang berbunyi:

ثُمَّ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ فِيهَا وَاسْتَعْمَرُوا فِيهَا مِنَ الْأَرْضِ مَنْ أَنْشَأَكُمْ هُوَ غَيْرُهُ إِلَهٌ مِّنْ لَّكُمْ مَا اللَّهُ اعْبُدُوا قَوْمٌ يَا قَالِ صَالِحًا أَخَاهُمْ تَمُودَ وَإِلَى مُجِيبٌ قَرِيبٌ رَبِّي إِنَّ إِلَهِي لَتُوبُوا

Artinya : Dan kepada Tsamud (Kami utus) saudara mereka Shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanku amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya)". (QS 11:61)

Otonomi daerah akan menuntut aparaturnya yang berkemampuan, sehingga masyarakat secara nyata memperoleh manfaat dari adanya otonomi itu. Agar tujuan dan usaha pembangunan daerah dapat berhasil dengan baik maka pemerintah daerah perlu berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, pembangunan daerah juga merupakan usaha mengembangkan dan memperkuat pemerintah daerah dalam rangka makin mantapnya penyelenggaraan otonomi daerah. Otonomi daerah bukan diartikan hanya sebagai proses administrasi politik yang berupa pelimpahan wewenang pembangunan dan pemerintahan kepada pemerintah daerah, melainkan lebih merupakan suatu proses pembangunan daerah sendiri dengan segala komitmen dan tanggung jawab yang mengiringinya, yang menuntut kemampuan seluruh aparaturnya yang berkemampuan dalam penguasaan substansi dan manajemen pembangunan (Kartasmita, 1996). Diberlakukannya undang-undangan dapat memberikan peluang bagi daerah untuk

menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya dalam rangka mewujudkan kemandirian daerah. Perwujudan kemandirian daerah untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kinerja keuangannya tersebut melalui desentralisasi fiskal.



Gambar 1. 1 Belanja Modal Provinsi Di Pulau Sumatera Tahun 2013-2015

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Riau Dalam Angka

Dari tabel 1.2 diatas merupakan pendapatan dari belanja modal di seluruh Pulau Sumatera yang mencakup 10 Provinsi. Dari 10 Provinsi tersebut belanja modal paling besar di tahun 2013 yaitu dari Provinsi Riau dengan pendapatan sebesar Rp. 2.687.869 disusul oleh Provinsi Nanggroh Aceh Darussalam sebesar Rp. 1.855.440, sedangkan pendapatan belanja modal paling rendah ditahun 2013 adalah Provinsi Bengkulu dengan pendapatan belanja modalnya sebesar Rp. 300.141. Tahun 2014 pendapatan paling besar

dari Provinsi Nanggroh Aceh Darussalam sebesar Rp. 2.967.172 dan ditahun selanjutnya 2015 pendapatan paling besar dari Provinsi Riau sebesar Rp. 2.901.125.

Dengan adanya undang-undang yang mengatur desentralisasi menuntut pemerintah daerah untuk melakukan pengelolaan daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien atau bisa disebut dengan 3E. Untuk mencapai ekonomis, efektif, dan efisien maka Peraturan Menteri Dalam Negeri (permedagri) telah menetapkan No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Untuk lebih memaksimalkan pengelolaan keuangan daerah dan untuk memaksimalkan 3E di pemerintah daerah maka diterbitkanlah PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Permendagri No. 13

Tahun 2006 menjelaskan bahwasannya belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan untuk pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaat jangka panjang, seperti pembangunan gedung dan bangunan jalan, irigasi dan aset tetap lainnya. Maka dapat disimpulkan bahwasannya belanja modal merupakan strategi investasi yang baik karena pada umumnya akan mengkondisikan bagaimana keadaan ekonomi suatu instansi (Nugroho, 2017).

Pemerintah daerah harus mampu mengalokasikan anggaran daerah dengan baik. Semakin tinggi investasi modal diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik yang kemudian menciptakan kemandirian daerah dengan mengoptimalkan potensi pendapatan yang dimiliki daerah dan memberikan proposi belanja modal yang lebih besar untuk pembangunan sektor-sektor produktif di daerah (Wahyuningsih, 2016)

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain dari PAD yang sah. Peningkatan PAD diharapkan dapat meningkatkan investasi belanja modal pemerintah daerah sehingga kualitas dari

pelayanan publik semakin baik tetapi yang akan terjadi adalah peningkatan pendapatan asli daerah tidak diikuti dengan kenaikan anggaran belanja modal yang signifikan hal ini disebabkan karena pendapatan asli daerah banyak tersedot untuk membiayai belanja yang lainnya, dimana persentasi belanja lainnya lebih besar daripada belanja modal itu sendiri. Jadi hal seperti inilah yang menyebabkan kualitas pelayanan publik tidak naik, melainkan bisa semakin menurun (Suryana, 2017).

Penganggaran belanja-belanja yang akan dilakukan setidaknya bertujuan untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di masing-masing kabupaten/kota di Provinsi Riau. Ketika pengelolaan keuangan pemerintah daerah dilakukan dengan cara yang baik maka perekonomian dapat meningkat. Tugas utama dari pemerintah daerah adalah untuk melakukan pelayanan publik, ketika pelayanan publik dilakukan secara baik maka kepercayaan publik akan meningkat terhadap pengelolaan uang di masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Ketika kepercayaan publik meningkat dapat dipastikan PAD juga akan meningkat.

Selain dari PAD dan transfer dari pusat untuk membiayai kegiatan. Pemerintah daerah dapat memanfaatkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya. SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan peneluaran anggaran selama satu periode anggaran yang nantinya dapat dipergunakan pada tahun berikutnya.

Jumlah SiLPA yang ideal perlu ditentukan sebagai salah satu dasar evaluasi terhadap pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah daerah kota/kabupaten. Pelampauan target SiLPA yang bersumber dari kesuksesan target pemerintah daerah dan efisiensi suatu anggaran sangatlah diharapkan sedangkan yang bersumber dari tidak adanya suatu program atau kegiatan pembangunan dalam jumlah tidak wajar yang mana dapat merugikan masyarakat menegaskan bahwa SiLPA yang dihasilkan oleh APBD dipergunakan untuk kepentingan masyarakat.

Sebagian besar SiLPA diberikan ke Belanja Langsung yaitu belanja secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat. Jumlah belanja langsung berupa pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan sebagainya. Anggaran belanja modal di dasarkan pada kebutuhan daerah akan sarana dan prasarana, baik untuk akses kemudahan dalam melaksanakan tugas pemerintah maupun untuk fasilitas publik. Seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa pada tahun anggaran harus dianggarkan dalam APBD.

Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif dan mendapatkan kebebasan dalam pengambilan keputusan penggunaan anggaran disektor publik maka harus juga mendapat dukungan sumber-sumber keuangan yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil). Peran pemerintah dalam membangun perekonomian disuatu daerah tidak terlepas dari APBD. Tugas pemerintah adalah membangun perekonomian daerah dan melakukan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat terutama dalam hal belanja modal sangatlah penting. Belanja modal daerah sendiri menurut Perpres No 5 Tahun 2010 dikatakan bahwasannya belanja modal dianggarkan sebesar 30% dari belanja daerah.

Dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan azas desentralisasi, kepala Daerah diberikan kewenangan untuk memungut pajak/retribusi (*tax assignment*) dan pemberian bagi hasil penerimaan (*revenue sharing*) serta bantuan keuangan (*grant*) atau dikenal sebagai dana perimbangan sebagai sumber dana bagi APBD. Secara umum, sumber dana bagi daerah terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan (dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus) dan pinjaman daerah, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Tiga sumber pertama

langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah melalui APBD, sedangkan yang lainnya dikelola oleh Pemerintah Pusat melalui kerjasama dengan Pemerintah daerah.

Wujud dari desentralisasi fiskal ialah pemberian sumber-sumber penerimaan bagi daerah yang dapat digali dan digunakan sendiri sesuai dengan potensinya masing-masing. Kewenangan Daerah untuk memungut pajak dan retribusi diatur dengan undang-undang nomor 34 tahun 2000 yang merupakan penyempurnaan dari undang-undang nomor 18 tahun 1997 dan ditindaklanjuti peraturan pelaksanaannya dengan peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2001 tentang Pajak Daerah dan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2001 tentang retribusi daerah.

Penduduk merupakan populasi atau sumber daya manusia yang mendiami atau menduduki suatu wilayah tertentu. Penduduk dewasa ini merupakan subjek pembangunan, meningkatnya jumlah penduduk menuntut konsekuensi logi adanya peningkatan sarana dan prasarana umum di suatu daerah, baik aspek kuantitas maupun kualitas. Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, jumlah penduduk menjadi variabel utama dalam menentukan kebutuhan pendanaan daerah untuk melaksanakan fungsi layanan dasar umum. Perkembangan jumlah penduduk yang semakin besar akan memerlukan anggaran yang semakin besar, supaya kualitas pertumbuhan ekonomi lebih baik, pertumbuhan penduduk harus selalu dikendalikan.

Umur dan jenis kelamin merupakan karakteristik penduduk yang paling pokok, komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin paling sering digunakan dalam berbagai bidang. Komposisi penduduk menurut umur dikenal dengan istilah struktur penduduk, biasanya dibagi menjadi beberapa kelompok umur.

Berdasarkan daerah-daerah yang memiliki potensi sumberdaya yang dapat diandalkan, baik sumberdaya manusia maupun sumberdaya alam kebijakan Otonomi daerah disambut baik, dikarenakan terbuka peluang bagi pemerintah daerah untuk

mengelola daerah secara mandiri termasuk dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu harapan dari kebijakan tersebut ialah daerah diberi kesempatan untuk percepat pertumbuhan ekonomi dan memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Sebaliknya bagi daerah-daerah yang memiliki keterbatasan sumberdaya, kebijakan demikian akan memberatkan daerah yang tidak memiliki potensi sumberdaya dalam keuangan atau dana yang melimpah akan mengalami kesulitan dalam membiayai belanja daerahnya.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan ekonometrika untuk menganalisis hubungan timbal balik antara teori, pengujian dan estimasi empiris. Analisis ini menggunakan analisis regresi linier berganda yaitu teknik statistik yang biasa digunakan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dependen dan variabel independen. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Penelitian ini mencakup 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau obyek dalam penyusunan skripsi ini yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), dan Jumlah Penduduk (JP) Terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau Tahun 2013-2017. Alat analisis yang digunakan adalah data panel dengan menggunakan *evIEWS 9* dengan menggunakan pendekatan efek tetap (*Fixed Effect Model*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Uji Kualitas Data

1. Uji Heteroskedastisitas

Pada uji heteroskedastisitas agar mengetahui apakah terdapat masalah, karena masalah bersumber dari variasi data *cross section* yang digunakan. Data *cross section* yang meliputi unit yang heterogen, heteroskedastisitas mungkin lebih merupakan kezaliman (aturan) dari pada pengecualian (Gujarati, 2007).

Heteroskedastisitas yaitu suatu model regresi yang terdapat perbedaan dari varian residual atau observasi, agar model yang baik tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini variabel. Dibawah ini berdasarkan Uji Glenjer, nilai probabilitas dari semua variabel independen tidak signifikan pada tingkat 5%.

Tabel 5. 1 Uji Heteroskedastisitas

Variabel	Probabilitas
LOG(PDRB)	0.7661
LOG(PAD)	0.3625
LOG(SILPA)	0.1543
LOG(JP)	0.3557

Sumber: Hasil olahan data

Dari tabel diatas, maka dapat dilihat bahwa probabilitas variabel PDRB, PAD, SiLPA, dan jumlah penduduk lebih dari 5% (0,05). Dapat disimpulkan bahwa data yang digunakan sebagai variabel independen terbebas dari masalah heterokedastisitas.

2. Uji Multikolinearitas

Deteksi adanya multikoleniaritas dilakukan dengan menggunakan uji kolerasi parsial antar variabel independen, yaitu dengan menguji koefisien kolerasi antar variabel independen dengan dependennya (Gujarati, 2007).

Tabel 5. 2 Uji Multikolinearitas

	Log(PDRB)	Log(PAD)	Log(SiLPA)	Log(JP)
Log(PDRB)	1.000000	0.748680	0.076336	0.757702
Log(PAD)	0.748680	1.000000	-0.197623	0.596646
Log(SiLPA)	0.076336	-0.197623	1.000000	-0.158750
Log(JP)	0.757702	0.596646	-0.158750	1.000000

Sumber: Hasil olahan data

Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tidak adanya multikolinearitas antara variabel independen. Hal ini terlihat dari tidak adanya koefisien kolerasi antar variabel yang besar dari 0,9.

B. Pemeliharaan Model Analisis

1. Uji Chow

Uji Chow merupakan uji untuk menentukan model terbaik common effect dengan fixed effect. Jika hasilnya menerima hipotesis nol maka model terbaik untuk digunakan adalah common effect. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis model maka model terbaik yang digunakan adalah fixed effect, dan akan dilanjutkan dengan uji Hausman.

Tabel 5. 3 Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f	Prob.
Cross-section F	5.343786	(11,44)	0.0000
Cross-section Chi-square	50.905030	11	0.0000

Sumber: Hasil olahan data

Hasil dari tabel 5.3 dapat dilihat bahwa nilai probabilitas Cross Section dan Chi Squar adalah 0,0000 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak. Sehingga dengan demikian menggunakan Common Effect Model, dan dilanjutkan ke Uji Hausman.

2. Uji Hausman

Uji Hausman merupakan pengujian untuk menentukan untuk menggunakan metode antara random effect dan fixed effect. Jika hasil uji hausman tersebut menyatakan menerima hasil hipotesis nol maka model terbaik untuk digunakan adalah random effect. Akan tetapi, jika hasilnya menyatakan menolak hipotesis nol maka model terbaik yang digunakan adalah fixed effect.

Tabel 5. 4 Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq	Chi-Sq. d. f.	Prob.
Cross-section random	14.601443	4	0.0056

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan tabel diatas, nilai probabilitas Cross-section random adalah 0,0056 yang lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis nol ditolak. Jadi, menurut uji Hausman, model yang digunakan adalah model menggunakan metode Random Effect.

3. Analisis Model Data Panel

Tabel 5. 5 Hasil Regres Data Panel

Variabel Dependen: Belanja Modal	Model		
	Common Effect	Fixed Effect	Random Effect
LOG_PDRB	0.0659	0.6018	0.3520
LOG_PAD	0.0839	0.0006	0.0363
LOG_SiLPA	0.0000	0.0003	0.0000
LOG_JP	0.7778	0.0042	0.6977
R ²	0.536170	0.801438	0.441725
F-Statistik	15.89448	11.83956	10.87945
Prob (F-Stat)	0.000000	0.000000	0.000001
Durbin-Watson Stat	1.324841	2.375065	2.073179

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan uji spesifikasi model yang dilakukan dengan Uji Chow dan Uji Hausman, maka model terbaik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Modal adalah Fixed Effect. Dipilihnya Fixed Effect karena memiliki probabilitas masing-masing variabel independen yang signifikan.

C. Hasil Estimasi Model Regresi Data Panel

Berdasarkan dari uji model yang telah dilakukan serta dari perbandingan nilai terbaik maka model regresi data panel yang digunakan adalah Fixed Effect Model (FEM). Pada pengujian sebelumnya, model telah lolos dari uji asumsi klasik, sehingga hasil yang didapatkan setelah estimasi konsisten dan tidak bias. Berikut tabel yang menunjukkan hasil estimasi data dengan jumlah observasi sebanyak dua belas (12) Kabupaten/Kota selama periode 2013-2017 (5 tahun)

Dari hasil regres pada tabel 5.6 dibawah ini, maka dapat disimpulkan secara menyeluruh diperoleh hasil persamaan regresi data panel sebagai berikut:

Tabel 5. 6 Hasil Estimasi Fixed Effect Model

Variabel Dependen Belanja Modal	Model
	Fixed Effect
Konstanta	93.92632
Standar error	24.04066
T-Statistik	3.906977
Probabilitas	0.0003
PDRB	-0.831944
Standar error	1.582832
T-Statistik	-0.525604
Probabilitas	0.6018
PAD	0.823740
Standar error	0.222672
T-Statistik	3.699338
Probabilitas	0.0006
SiLPA	0.160330
Standar error	0.040973
T-Statistik	3.913107
Probabilitas	0.0003
Jumlah Penduduk	-6.401432
Standar error	2.121374
T-Statistik	-3.017587
Probabilitas	0.0042
R²	0.801438
F-Statistik	11.83956
Prob (F-Stat)	0.000000
Durbin-Watson Stat	2.375065

Sumber: Hasil olahan data

Berdasarkan data hasil estimasi diatas, maka dapat dibuat model analisis data panel terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi belanja modal pada dua belas kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat disimpulkan sebagai berikut:

$$\text{LogBMit} = \alpha + \beta_1 \text{Log(PDRB)it} + \beta_2 \text{Log(PAD)it} + \beta_3 \text{Log(SiLPA)} + \beta_4 \text{Log(JP)it} + et$$

Keterangan:

BM = Belanja Modal

α = Konstanta

β_{1234} = Koefisien variabel 1, 2, 3, 4

Log(PDRB) = Produk Domestik Regional Bruto

Log(PAD) = Pendapatan Asli Daerah

Log(SiLPA) = Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran

Log(JP) = Jumlah Penduduk

i = Bengkalis, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kampar, Kuantan
Singingi, Pelalawan, Rokan Hilir, Rokan Hulu, Siak, Dumai,
Pekanbaru, Kepulauan Meranti

t = 2013, 2014, 2015, 2016, 2017

dimana diperoleh hasil sebagai berikut:

$$\text{LogBM}_{it} = \alpha + \beta_1 \text{Log(PDRB)}_{it} + \beta_2 \text{Log(PAD)}_{it} + \beta_3 \text{Log(SiLPA)}_{it} + \beta_4 \text{Log(JP)}_{it} + \epsilon_{it}$$

$$\text{LogBM}_{it} = 49.70680 - 0.831944 \beta_1 \text{Log(PDRB)}_{it} + 0.823740 \beta_2 \text{Log(PAD)}_{it} + 0.160330 \beta_3 \text{Log(SiLPA)}_{it} - 6.401432 \beta_4 \text{Log(JP)}_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan:

α = Dengan nilai sebesar 49.70680 dapat dijelaskan bahwa apabila semua variabel independen (Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, Jumlah Penduduk) dianggap konstan atau tidak mengalami perubahan maka belanja modal sebesar 49.70680%.

β_1 = Nilai sebesar -0.831944 dapat dijelaskan bahwa ketika produk domestik regional bruto turun sebesar 1% maka belanja modal mengalami penurunan sebesar 0.831944% dengan asumsi belanja modal tetap.

β_2 = Nilai sebesar 0.823740 dapat dijelaskan bahwa ketika pendapatan asli daerah naik sebesar 1% maka belanja modal mengalami kenaikan sebesar 0.823740% dengan asumsi belanja modal tetap.

β_3 = Nilai sebesar 0.160330 dapat dijelaskan bahwa ketika sisa lebih pembiayaan anggaran naik sebesar 1% maka belanja modal mengalami kenaikan sebesar 0.160330% dengan asumsi belanja modal tetap.

β_4 = Nilai sebesar -6.401432 maka dapat dijelaskan bahwa ketika jumlah penduduk naik 1% maka belanja modal mengalami penurunan sebesar 6.401432% dengan asumsi belanja modal tetap.

D. Uji Statistik

1. Uji Parsial (T-Statistik)

Dalam uji parsial dilakukan untuk mengetahui tentang hubungan antara setiap individu variabel independen (Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Jumlah Penduduk) terhadap variabel dependen. Uji parsial dapat diketahui dengan cara melihat koefisien regresi dan probabilitas pada setiap variabel independen serta dengan memperlihatkan standar probabilitas $\alpha < 0.05$.

Tabel 5. 7 Uji T-Statistik

Variabel	T-Statistik	Koefisien Regres	Prob.	Standad Prob.
PDRB	-0.525604	-0.831944	0.6018	0.05
PAD	3.699338	0.823740	0.0006	0.05
SILPA	3.913107	0.160330	0.0003	0.05
JP	-3.017587	-6.401432	0.0042	0.05

Sumber: Hasil olahan data

2. Uji Simultan (F-Statistik)

Uji simultan dilakukan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat secara keseluruhan. Berdasarkan hasil analisis menggunakan software Eviews 9, diperoleh nilai probabilitas F-Statistik sebesar 0.000000 dengan standar probabilitas 0.05 ($\alpha = 5\%$). Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa secara bersama-sama variabel independen produk domestik regional bruto, pendapatan asli daerah, sisa lebih pembiayaan anggaran, dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen belanja modal di Provinsi Riau.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur seberapa jauh model menerangkan variasi variabel dependen. Adapun hasil yang didapatkan pada tabel 5.5 menunjukkan nilai R^2 sebesar 0.801438 yang artinya bahwa Belanja Modal di Provinsi Riau 80.14% dipengaruhi oleh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Jumlah Penduduk. Sedangkan sisanya yaitu sebesar 19.86% dipengaruhi oleh variabel diluar variabel penelitian ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu, sebagai berikut:

1. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Produk Domestik Regional Bruto tidak berpengaruh secara signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal di Provinsi Riau dengan nilai koefisien sebesar -0.831944 dan probabilitas tidak signifikan sebesar 0.6018. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan

berarti apabila produk domestik regional bruto naik maka akan menaikkan Belanja Modal di Provinsi Riau. Permasalahannya sejumlah faktor tertentu yang mempengaruhi yakni proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) setiap kabupaten/kota yang selain memperhatikan kondisi makro ekonomi daerah. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

2. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Pendapatan Asli Daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Riau dengan nilai koefisien sebesar 0.823740 dan probabilitas signifikan sebesar 0.0006. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan berarti apabila pendapatan asli daerah naik maka akan menaikkan Belanja Modal di Provinsi Riau. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
3. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran berpengaruh signifikan dan positif terhadap Belanja Modal di Provinsi Riau dengan nilai koefisien sebesar 0.160330 dan probabilitas signifikan sebesar 0.0003. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan berarti apabila sisa lebih pembiayaan anggaran naik maka akan menaikkan Belanja Modal di Provinsi Riau. Hal ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan.
4. Hasil pengujian menunjukkan bahwa variabel Jumlah Penduduk tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap Belanja Modal di Provinsi Riau dengan nilai koefisien sebesar -6.401432 dan probabilitas signifikan 0.0042. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan berarti apabila jumlah penduduk naik maka akan menurunkan Belanja Modal di Provinsi Riau. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan.

Berdasarkan hasil estimasi regresi pengolahan data panel dengan menggunakan metode Fixed Effect Models pada eviews 9, diketahui nilai koefisien determinasi

adalah sebesar 0.801438, artinya 80.14% variabel independen dalam model mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap Belanja Modal selama periode waktu penelitian. Sedangkan sisanya sebesar 19.86% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak termasuk dalam model estimasi.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran yang berhubungan dengan hasil penelitian sebagai bahan pertimbangan dan masukan agar penelitian ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Riau berpengaruh positif dan signifikan yang mana mempunyai arti jika pendapatan asli daerah naik maka akan menaikkan Belanja Modal. Perlunya pemerintah dalam mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui Retribusi Daerah, Pajak Daerah, Hasil Badan Usaha Miliki Daerah, dan Lain-lainnya PAD yang sah. Dengan pendapatan asli daerah yang semakin bertambah harapannya mampu meningkatkan belanja modal yang mampu dinikmati oleh masyarakat.
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) di Provinsi Riau berpengaruh positif dan signifikan yang mana mempunyai arti jika sisa lebih pembiayaan anggaran naik maka akan menaikkan Belanja Modal. Pemerintah untuk lebih mengoptimalkan belanja modal dalam menggunakannya dan sisa lebih pembiayaan anggaran dapat digunakan ketika nanti ada kendala atau devisa dalam pengeluaran pemerintah dapat digunakan sebaik mungkin.
3. Jumlah Penduduk di Provinsi Riau berpengaruh negatif dan signifikan yang mana mempunyai arti jika jumlah penduduk naik maka akan menurunkan Belanja Modal. Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam hal meningkatkan keahlian

dan keterampilan dan pesebaran untuk penduduk agar meningkatkan produksi nasional secara maksimal. Karena semakin banyaknya penduduk akan menjadi beban jika struktur belanja rendah tetapi banyak yang menuntut pelayanan sosial dan tingkat produksinya rendah sehingga akan menjadi tanggungan penduduk yang bekerja secara efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arini, P. R. (2016). Pengaruh Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Di Pulau Kalimantan. *JRAMB Prodi Akutansi Fakultas Ekonomi UMB Yogyakarta Vol. 2 No. 2*.
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2015). *Pengantar Ekonomi Mikro Dan Maksro*. Yogyakarta: Danisa Media.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (2016). *Ekonometrika Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.
- Basuki, A. T., & Yuliadi, I. (n.d.). *Ekonometrika Teori dan Aplikasinya*. Yogyakarta: Mitra Pustaka Nurani.
- Devita, A., Delis, A., & Junaidi. (2014). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan pembangunan Daerah vol. 2 No. .*
- Farel, R. (2015, Oktober). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Di Kabupaten Bogor.
- Gujarati, D. (2007). *Dasar-dasar Ekonometrika*. Jakarta: Erlangga.
- Hapsari, A. P., & Iskandar, D. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah Periode 2010-2014. *JIEP FEB Universitas Diponegoro Vol. 18, No. 1*.
- Hartiningsih, N., & Eryanus Herman, H. (2015, May). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Modal Di Provinsi Riau. *JURNAL TEPAK MANAJEMEN BISNIS*.
- Hudiyanto. (2017). *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Lingkar Media.
- Kartasmita, G. (1996). *PEMBANGUNAN UNTUK RAKYAT*. Jakarta: PT. Pustaka CIDESINDO.
- Kosim, E. (2017). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA) TERHADAP ANGGARAN BELANJA MODAL PADA PEMERINTAH KOTA BANJAR. *Management Review*.

- Novianto, R. (2015). Pengaruh Pendapatan Asli, Dana Perimbangan Dan Kinerja Keuangan Terhadap Alokasi Belanja Modal pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Ekonomi Vol. 4 No. 1* .
- Nuarisa, S. A. (2013). Pengaruh PAD, DAU, DAN DAK TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL. *Accounting Analysis Journal 2*.
- Nugroho, T. S. (2017). Analisis Data Panel Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Modal Kabupaten/Kota Dan Pemerintah Provinsi Di Seluruh Indonesia. *Jurnal Riset dan Manajemen & Akutansi Volume 8 No 2, 2*.
- Nurlis. (2016). The Factors Affecting of the Capital Expenditure Allocation Case: The Local Government of Indonesia. *Research Journal of Finance and Accounting Vol. 7 No. 1*.
- Prakosa, K. B. (2004). Analsis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah (Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY). *JAAI Volume 8 No. 2*.
- Raja, T. H. (2015). Influence Product Domestic Regional Bruto (PDRB), Total. *Advances in Social Sciences Research Journal Vol. 5 No. 1*.
- Riau Dalam Angka. (2013). Riau: BPS Provinsi Riau.
- _____. (2014). Riau: BPS Provinsi Riau.
- _____. (2015). Riau: BPS Provinsi Riau.
- _____. (2016). Riau: BPS Provinsi Riau.
- _____. (2017). Riau: BPS Provinsi Riau.
- _____. (2018). Riau: BPS Provinsi Riau.
- Simanjuntak, P. J. (1985). *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Siswanto, & D. Kusnandar. (2012). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran, dan Luas Wilayah Terhadap Belanja Modal.
- Sugiyanta. (2016). Analisis Belanja Modal Dan Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Indonesia. *Jurnal Akutansi Universitas Jember Vol. 14 No. 1*.
- Suryana, R. (2017). FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU. 59.
- Todaro, M. P. (2000). *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Triyanto, D., Wahyudi, S., & Ananda, C. (2017). The Effect of Capital Expenditure on Local Own-Source Revenue: Study In East Java Indonesia. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan Vol. 10 No. 2*.
- Tuasikal, A. (2008). PENGARUH DAU, DAK, PAD, DAN PDRB TERHADAP BELANJA MODAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA DI INDONESIA. *Jurnal Telaah & Riset Akutansi*.

- Wahyudin, D., & Yuliadi, I. (2013, Oktober). DETERMINAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI DAERAH YOGYAKARTA, INDONESIA. *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan, Volume 14*.
- Wahyuningsih, A. (2016). *PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PENGALOKASIAN BELANJA MODAL PADA KABUPATEN/KOTA D.I. YOGYAKARTA*. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMY.
- Wati, M. R., & Martian Fajar, C. (2017). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Daerah Kota Bandung. *Jurnal Kajian Akutansi Vol. 1*.